

Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional

Ana Purnama Sari¹, Hanna Maryani²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Putra Pekanbaru

E-mail: anapurnamasari97@gmail.com¹, hannapcy01@gmail.com²

Abstrak

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan ekonomi. Namun, kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan daya beli rendah dan sektor-sektor ekonomi yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah dan perekonomian nasional. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, disarankan kebijakan mitigasi berupa pemberian subsidi pada barang pokok, penguatan infrastruktur distribusi barang, serta pengembangan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review) untuk menganalisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat daerah dalam kesejahteraan ekonomi nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang terjadi berdasarkan data dan informasi yang diambil dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, artikel yang relevan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan evaluasi kebijakan secara berkala sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Pajak, Ekonomi, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukkan negara dan telah diatur berdasarkan Undang-undang mengenai pajak. Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh rakyat guna membayarkan pajak akan masuk kedalam pos pendapatan negara yang nantinya masuk kedalam sektor pajak. Pajak mempunyai peranan yang cukup penting dalam sektor perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi penyumbang pendapatan terbesar.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN tahun 2023 direncanakan senilai Rp 2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan senilai Rp 441,4 triliun. Target tersebut tentunya telah diperhitungkan melalui berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan. Untuk mencapai target APBN 2023, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pada sektor pajak terhadap negara. Salah satu caranya ialah dengan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak.

Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku yaitu dengan memenuhi kewajiban maupun melaksanakan hak mengenai perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela merupakan istilah dari Kepatuhan Wajib Pajak. Atau bisa disebutkan bahwa wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan. Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya ialah adanya program tax amnesty,

pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak, dan sanksi mengenai perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini sering kali menimbulkan pro dan kontra, khususnya dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap masyarakat daerah. Dalam konteks perekonomian nasional, kenaikan PPN dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, struktur harga barang dan jasa, serta keseimbangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah suatu negara. PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang berarti pajak ini dibayarkan oleh konsumen akhir saat membeli barang atau jasa, tetapi penyetorannya ke pemerintah dilakukan oleh pihak penjual atau penyedia jasa. PPN diterapkan secara berjenjang di setiap tahap produksi dan distribusi, namun pada akhirnya bebannya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN adalah salah satu sumber utama penerimaan pajak negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan program sosial.

Dengan tarif PPN, pemerintah dapat mengendalikan konsumsi barang atau jasa tertentu, terutama barang mewah atau yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. PPN berbasis faktur memberikan transparansi lebih tinggi dibandingkan pajak lain karena setiap transaksi harus didukung oleh bukti pembayaran. PPN menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan modern, yang tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara tetapi juga berperan dalam mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab di masyarakat.

Masyarakat daerah, yang umumnya memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan, menjadi kelompok yang rentan terhadap kebijakan ini. Peningkatan tarif PPN dapat menyebabkan lonjakan harga barang kebutuhan pokok, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli mereka. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat basis fiskal negara dan mendukung program-program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022, kenaikan lebih lanjut menjadi 12% dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru soal PPN 12% resmi terbit dan berlaku. PMK Nomor 131 Tahun 2024 ini mengatur tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. Terbitnya peraturan tertulis tersebut merupakan tindak lanjut dari pengumuman Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah.

PMK 131 Tahun 2024 mengatur perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor, penyerahan barang dan jasa kena pajak, serta pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar negeri di wilayah Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan

pendapatan negara guna mendukung berbagai program pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Namun, kenaikan PPN ini juga menimbulkan tantangan dan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat daerah yang memiliki daya beli lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan.

Kenaikan PPN berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di daerah-daerah tertentu, di mana pendapatan per kapita cenderung lebih rendah dan akses terhadap barang kebutuhan pokok lebih terbatas, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi. Lonjakan harga akibat kenaikan PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional dan nasional.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di wilayah pabean Indonesia, mencakup darat, perairan, ruang udara, serta area tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang diatur oleh undang-undang kepabeanan. PPN dikenakan pada konsumsi barang atau jasa kena pajak dan termasuk jenis pajak tidak langsung, di mana pajak ini disetorkan oleh pihak lain (seperti pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak langsung. Konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan pajak secara langsung. Pendapatan dari PPN merupakan komponen penting dalam total penerimaan pajak negara, berfungsi sebagai penopang pembiayaan agenda pembangunan nasional, termasuk percepatan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur. Kenaikan PPN, yang diatur dalam peraturan pemerintah dengan tarif minimum 5% dan maksimum 15%, bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendorong stabilitas ekonomi.

Peningkatan tarif PPN baru-baru ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dan membebani anggaran negara, termasuk dana bantuan sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan perpajakan yang mendukung kesejahteraan rakyat, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak tertentu, serta pemberian insentif fiskal. Namun, jika masyarakat merasa manfaat dari pajak yang mereka bayarkan tidak sejalan dengan kebutuhan atau fungsi pajak yang ideal, hal ini dapat menurunkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Secara makroekonomi, kenaikan tarif PPN berdampak pada konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Sementara beberapa teori menyebutkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan konsumsi jangka pendek, penelitian lain menunjukkan bahwa dampaknya terhadap inflasi tidak signifikan. Kenaikan tarif PPN pada tahun 2022 juga disertai perubahan dalam struktur pajak progresif untuk pajak penghasilan.

Selain itu, masyarakat daerah sering kali menghadapi kendala dalam hal infrastruktur ekonomi dan distribusi barang. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga barang yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat struktur anggaran negara dan mendukung program pembangunan berkelanjutan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi secara komprehensif dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat daerah dan implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi nasional.

Peningkatan tarif PPN langsung memengaruhi harga barang dan jasa. Bagi masyarakat di daerah, yang sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga akibat kebijakan ini berisiko menurunkan daya beli mereka. Situasi ini diperparah oleh disparitas ekonomi antara daerah dan perkotaan, di mana akses terhadap barang

dan jasa di daerah sering kali lebih terbatas dan harga cenderung lebih tinggi akibat biaya distribusi yang mahal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat daerah dan perkotaan. Selain itu, kenaikan PPN juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pola konsumsi masyarakat.

Penurunan daya beli dapat menurunkan tingkat konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi perhatian, mengingat konsumsi rumah tangga adalah salah satu kontributor utama dalam produk domestik bruto (PDB). Kebijakan kenaikan PPN juga berpotensi memberikan dampak negatif pada sektor informal, yang banyak bergantung pada daya beli masyarakat lokal. Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Penerimaan dari kenaikan PPN diharapkan dapat dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun, untuk memastikan kebijakan ini dapat diterima secara luas, diperlukan strategi mitigasi yang mampu meminimalkan dampak negatif pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah.

Kenaikan PPN secara langsung menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di berbagai sektor. Hal ini dirasakan terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah, yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok. Peningkatan harga ini memicu kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan potensi terjadinya penurunan konsumsi domestik. Masyarakat di daerah terpencil sering kali menghadapi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibandingkan masyarakat perkotaan. Infrastruktur ekonomi yang belum merata, biaya distribusi yang tinggi, serta akses terbatas ke barang dan jasa membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kebijakan kenaikan PPN.

Fenomena ini mempertegas disparitas ekonomi antara daerah dan kota yang sudah menjadi perhatian dalam pembangunan nasional. Konsumsi rumah tangga adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan PPN berisiko menurunkan tingkat konsumsi ini, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat menghambat laju pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19. Kenaikan tarif PPN telah memunculkan berbagai kritik dari masyarakat dan pelaku usaha. Banyak yang mempertanyakan apakah kebijakan ini dilakukan pada waktu yang tepat, mengingat kondisi ekonomi global yang belum stabil dan inflasi yang masih menjadi ancaman.

Penelitian terhadap dampak kenaikan PPN menjadi penting untuk memberikan dasar yang kuat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal ini. Kenaikan PPN tidak hanya memengaruhi konsumen akhir, tetapi juga memberikan tekanan pada pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak UKM kesulitan untuk menyerap kenaikan biaya produksi tanpa menaikkan harga, sehingga menghadapi risiko kehilangan daya saing. Pemerintah menyatakan bahwa penerimaan dari kenaikan PPN akan digunakan untuk mendanai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Namun, diperlukan penelitian untuk memastikan apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kenaikan tarif PPN memengaruhi masyarakat daerah dalam berbagai aspek, termasuk daya beli, pola konsumsi, dan distribusi pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, sehingga kebijakan tersebut tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat daerah serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi nasional. Studi ini juga akan mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan ini, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan analitis yang berlandaskan pada data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review) untuk menganalisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat daerah dalam kesejahteraan ekonomi nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang terjadi berdasarkan data dan informasi yang diambil dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, artikel yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data dari penelitian sebelumnya yang relevan. Data yang diperoleh digunakan untuk mendeskripsikan dampak kenaikan PPN pada berbagai aspek, seperti daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, konsumsi rumah tangga, serta implikasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, di mana informasi dibandingkan dan diverifikasi dari berbagai sumber literatur yang memiliki kredibilitas tinggi. Metodologi ini memungkinkan penelitian memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kebijakan kenaikan PPN secara lebih mendalam, dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan tinjauan literatur yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menjadi salah satu isu ekonomi yang menuai berbagai respons di tengah masyarakat. Pasal 2 PMK ini menetapkan bahwa barang mewah seperti kendaraan bermotor dan barang lainnya yang termasuk objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenai PPN dengan tarif 12%. Tarif ini dihitung berdasarkan harga jual atau nilai impor. Barang dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah dikenai PPN dengan tarif efektif sebesar 11%. Penghitungan ini menggunakan dasar pengenaan pajak berupa "nilai lain", yaitu $11/12$ dari harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian. Meskipun tarif dasar PPN adalah 12%, penggunaan nilai lain menyebabkan tarif efektif menjadi 11%.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sebagai bagian dari strategi fiskal dalam menopang pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun bertujuan baik, kebijakan ini memiliki dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat daerah, terutama dalam hal daya beli, ketimpangan ekonomi, dan keberlanjutan sektor UMKM. Kebijakan ini juga memberikan tantangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak disertai mitigasi yang tepat. Namun, dengan pengelolaan yang

baik, kenaikan PPN dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia. Adapun upaya tersebut harus sejalandengan tujuan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk dari sistem tersebut dengan menurunkan angka pajak, pembebasan rakyat, dan pemberian intensif pajak. Hal ini yang menjadikan diberlakukannya salah satu fungsi dari peran perpajakan. Pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat untuk memperbaiki infrastruktur, baik dari segi kebutuhan primer, sekunder maupun pemerataan pembangunan nasional, tentunya hal tersebut akan memiliki dampak terhadaprendahnya kesadaran pajak masyarakat. Jika fungsi pajak atau manfaat yang dirasakan masyarakat berbeda atau bahkan hilang dengan fungsi yang ada, maka masyarakat akan berhenti bekerja karena beban perekonomian yang bertambah. Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif adanya kebijakan kenaikan PPN yang dirasa akan meningkatkan pengeluaran dari masyarakat, karena terkadang kenaikan tersebut juga beriringan dengan bertambahnya kebutuhan pokok setiap harinya.

Akan tetapi berdasarkan peraturan yang ada bahwasanya tidak semua usaha dikenakan PPN. Melainkan terdapat beberapa ketentuan mengenai dikenakannya PPN terhadap barang dan jasa yang masuk dalam ketentuan tersebut. Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara makro ekonomi yang akan dilihat dari konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Banyak teori menyebutkan bahwasannya dampak kenaikan PPN dalam jangka pendek ialah menaikkan konsumsimasyarakat. Akan tetapi banyak juga para peneliti yang mengungkapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi yang terjadi. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022 secara bersamaan diiringi dengan perubahan dan penambahan pajak progresif pada pajak penghasilan.

Khusus untuk barang-barang tertentu yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM selain kendaraan bermotor, PPN 12% akan dikenakan bagi kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih. Kemudian, kelompok balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan peluru senjata api, kecuali untuk keperluan negara. Selanjutnya kelompok pesawat udara selain yang dikenai tarif PPnBM 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter, serta kelompok senjata api seperti senjata artileri, revolver, dan pistol, kecuali untuk keperluan negara. Dan yang terakhir yakni kelompok kapal pesiar mewah yang penggunaannya bukan untuk keperluan negara atau angkutan umum seperti kapal pesiar, kapal eksekursi, dan yacht.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keselarasan antara penerimaan negara yang meningkat dan pengalokasian anggaran yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kenaikan PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa yang dikenakan pajak tersebut. Hal ini berimbas pada menurunnya daya beli, terutama bagi masyarakat di daerah yang mayoritas berpenghasilan rendah. Keterbatasan pendapatan membuat masyarakat daerah lebih sensitif terhadap kenaikan harga, sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan menjadi semakin sulit dijangkau. Masyarakat di daerah, khususnya di wilayah terpencil, sudah menghadapi biaya distribusi barang yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat perkotaan. Dengan kenaikan PPN, disparitas harga antara daerah dan kota semakin melebar. Hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada, mengingat masyarakat di daerah sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap subsidi atau insentif

pemerintah. Sebagian besar aktivitas ekonomi di daerah didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam di setiap wilayahnya. Kekayaan alam di tanah air Indonesia menjadi suatu hal yang menarik dibanding dengan negara lain. Pemanfaatan sumber daya alam telah dikembangkan melalui sektor pariwisata, seperti pembangunan taman bermain yang juga berfungsi sebagai pusat edukasi, tempat olahraga, dan sektor-sektor lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa potensi kekayaan alam di Indonesia terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Penurunan aktivitas sosial akibat pandemi telah berdampak pada penurunan penerimaan pajak penghasilan, yang berpotensi melemahkan sektor perpajakan negara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dari dampak pandemi ini. Sudah ditemukan beberapa fenomena sosial tentang kemacetan pasar modal maupun tradisional, industri dan usaha lainnya merupakan hambatan besar bagi sistem pajak negara. Salah satu instrumen fiskal yang penting bagi pendapatan negara Indonesia adalah pajak, yang digunakan untuk mencapai target pembangunan.

Pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu variabel kebijakan untuk mengatur perekonomian, menyediakan public goods, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui redistribusi pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 84.8%. Salah satu instrumen pajak yang umum ditemui adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada komoditas barang yang diproduksi di Indonesia. PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu komoditas dan dipungut pada setiap tahapan produksinya.

Tarif PPN bersifat seragam untuk berbagai kelompok komoditi, sehingga pembagian beban pajak menjadi lebih merata karena setiap produk dari berbagai industri dikenakan tarif pajak yang sama. Sebagai salah satu pajak pusat, PPN tidak dikenakan pada semua barang atau jasa, tetapi hanya pada barang atau jasa tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan fiskal nasional sambil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun, diperhatikan bahwa penerapan kebijakan tersebut terjadi pada saat masyarakat sedang menghadapi dampak pandemi, seperti pengurangan jumlah karyawan (PHK), sehingga kebijakan ini sebenarnya memberatkan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif atau justru merugikan masyarakat. Kenaikan tarif PPN tentu saja menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa peningkatan tarif PPN dapat menjadi salah satu solusi alternatif bagi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Di sisi lain, beberapa pihak yang menentang kebijakan tersebut berpendapat bahwa kenaikan tarif ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena naiknya harga barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kenaikan tarif PPN ini juga berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat akibat

menurunnya produktivitas. Semua kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah tentu telah melalui proses yang panjang dan evaluasi yang cermat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya menghargai upaya pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi, sehingga ekonomi tetap stabil dan masyarakat dapat sejahtera. Sehingga dalam hal ini, kontribusi PPN dipengaruhi oleh stabilitas dan kelangsungan transaksi domestik serta dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN sebagai implementasi UU HPP.

Meskipun demikian, penting bagi kebijakan ini untuk dilaksanakan secara konsisten dan optimal, sambil pemerintah memitigasi risiko yang ada dengan menyiapkan skema kebijakan yang tepat. Untuk menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga komoditas, terutama pangan dan energi. Selain itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi lainnya, termasuk program peningkatan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan.

Kenaikan PPN memengaruhi daya saing UMKM karena mereka harus menghadapi kenaikan biaya produksi atau distribusi. Sementara itu, penurunan daya beli masyarakat membuat permintaan terhadap produk lokal menurun, sehingga memengaruhi keberlanjutan sektor ini yang merupakan tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Secara makroekonomi, konsumsi rumah tangga adalah salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, dampaknya dirasakan pada perlambatan pertumbuhan konsumsi yang pada gilirannya menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jauh, kenaikan PPN juga dapat memengaruhi stabilitas sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak adil berpotensi memunculkan resistensi atau protes, terutama di daerah yang merasa terpinggirkan dari perhatian pemerintah pusat. Meski menimbulkan tantangan, kenaikan PPN juga membawa peluang untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional jika dikelola dengan baik.

Pemerintah harus memastikan bahwa tambahan penerimaan pajak dialokasikan secara transparan dan efektif untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti: Subsidi barang kebutuhan pokok untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur di daerah untuk mendukung distribusi barang dan jasa. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pengecualian atau pengurangan pajak pada barang-barang esensial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Langkah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga daya beli di tingkat daerah.

Dampak Terhadap Masyarakat Daerah

Kenaikan tarif PPN secara langsung memengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Di daerah, di mana sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah, lonjakan harga ini berisiko menurunkan daya beli masyarakat. Sementara itu, biaya distribusi barang ke daerah yang cenderung tinggi semakin memperburuk dampak kenaikan harga. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil menghadapi beban ekonomi yang lebih berat dibandingkan masyarakat di perkotaan. Selain itu, sebagian besar masyarakat daerah menggantungkan hidup pada sektor informal dan usaha kecil.

Kenaikan PPN dapat mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan sektor ini, mengingat daya beli konsumen menurun. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperburuk ketimpangan ekonomi antardaerah. Namun, kebijakan ini juga memunculkan berbagai tantangan, khususnya bagi masyarakat daerah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih mudah beradaptasi dengan kebijakan fiskal, masyarakat di daerah sering kali lebih

rentan terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan tarif PPN. Salah satu dampak paling signifikan dari kenaikan PPN terhadap masyarakat daerah adalah penurunan daya beli. Kenaikan tarif pajak ini meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, termasuk kebutuhan pokok.

Masyarakat daerah, yang umumnya memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi atau mengalihkan pengeluaran dari kebutuhan sekunder dan tersier ke kebutuhan primer. Selain itu, kenaikan harga akibat PPN juga berdampak lebih besar di daerah terpencil karena tingginya biaya distribusi barang. Ketika harga barang di pasar lokal naik, daya beli masyarakat semakin tergerus, sehingga kesejahteraan mereka mengalami penurunan. Tekanan pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Di banyak daerah, ekonomi lokal sangat bergantung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kenaikan PPN menambah beban operasional bagi pelaku UMKM, yang sudah menghadapi tantangan seperti akses modal yang terbatas dan persaingan ketat. Dengan daya beli masyarakat yang menurun, permintaan terhadap produk-produk lokal juga ikut melemah. Hal ini menciptakan tekanan ganda bagi UMKM, yaitu menurunnya pendapatan sekaligus naiknya biaya operasional. UMKM juga sering kali tidak memiliki fleksibilitas untuk menyerap kenaikan pajak tanpa menaikkan harga jual. Akibatnya, mereka kehilangan daya saing dibandingkan dengan produk dari pasar yang lebih besar atau dari luar daerah. Situasi ini memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperburuk ketimpangan antara daerah dan kota. Peningkatan Ketimpangan Ekonomi Kenaikan PPN berisiko memperbesar ketimpangan ekonomi antara daerah dan perkotaan.

Di kota-kota besar, infrastruktur dan akses terhadap barang lebih baik, sehingga dampak kenaikan harga dapat diminimalkan. Sebaliknya, di daerah terpencil, masyarakat tidak hanya menghadapi kenaikan harga tetapi juga akses yang lebih sulit terhadap barang dan jasa. Ketimpangan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat daerah. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dalam akses terhadap subsidi atau bantuan pemerintah. Sering kali, program subsidi tidak sampai ke masyarakat daerah secara merata, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari dampak kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN. Kesimpulan Dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat daerah sangat nyata, terutama dalam hal daya beli, keberlanjutan UMKM, dan ketimpangan ekonomi.

Kebijakan ini memberikan tantangan besar bagi masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang tepat, seperti pemberian subsidi yang lebih terarah, insentif bagi pelaku UMKM, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan pendekatan yang inklusif, kenaikan PPN dapat dikelola agar tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Implikasi Terhadap Konsumsi dan Perekonomian Nasional

Dampak kenaikan PPN tidak hanya dirasakan oleh masyarakat daerah, tetapi juga memiliki implikasi terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebagai salah satu komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi rumah tangga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli akibat kenaikan harga barang dan jasa dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, kenaikan PPN juga memberikan tekanan tambahan pada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak UKM kesulitan untuk menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga jual, sehingga berisiko kehilangan daya saing di pasar.

Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mendorong penguatan sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Meski demikian, kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, terutama konsumsi rumah tangga dan perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan PPN secara langsung mempengaruhi harga barang dan jasa yang dikenakan pajak tersebut. Ketika harga barang meningkat akibat kenaikan PPN, daya beli masyarakat cenderung menurun, terutama bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah. Hal ini terjadi karena konsumen akan cenderung mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang yang tidak esensial atau beralih ke barang dengan harga yang lebih murah.

Konsumsi rumah tangga yang menurun akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada belanja konsumen, seperti perdagangan ritel, restoran, dan sektor jasa. Penurunan permintaan ini dapat memperlambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor UMKM yang dominan di daerah-daerah sering kali menjadi yang paling terpengaruh oleh kenaikan PPN. UMKM tidak hanya menghadapi tantangan dari kenaikan harga barang, tetapi juga kesulitan dalam menaikkan harga jual produk mereka untuk menutupi biaya tambahan yang timbul akibat kenaikan PPN.

UMKM yang memiliki margin keuntungan rendah akan kesulitan untuk menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. Selain itu, daya beli masyarakat yang menurun dapat mengurangi permintaan terhadap produk-produk UMKM, sehingga memperburuk kinerja sektor ini. Jika kebijakan ini tidak disertai dengan program subsidi atau insentif yang tepat, UMKM bisa mengalami kesulitan yang lebih besar, yang pada gilirannya berdampak pada lapangan kerja dan pendapatan masyarakat daerah. Kenaikan PPN berpotensi mendorong inflasi, terutama jika kenaikan harga barang dan jasa tidak dapat diimbangi dengan peningkatan daya beli. Masyarakat akan menghadapinya dengan harga barang yang lebih mahal, namun tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan.

Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat akan tergerus lebih jauh, yang memicu siklus penurunan konsumsi yang lebih dalam. Peningkatan inflasi juga memengaruhi kebijakan moneter, karena Bank Indonesia mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi rumah tangga yang menurun, khususnya di daerah-daerah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga, dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun kenaikan PPN berpotensi meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi dapat menahan pertumbuhan PDB.

Jika konsumsi masyarakat menurun tajam, pemerintah mungkin akan kehilangan daya dorong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan kenaikan PPN untuk diimbangi dengan langkah-langkah stimulasi yang mendukung daya beli masyarakat, seperti pemberian subsidi atau pengurangan pajak untuk barang-barang yang esensial. Kenaikan PPN cenderung lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari yang terkena pajak. Hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di daerah, yang cenderung memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dan sumber daya ekonomi, akan merasakan dampak yang lebih besar.

Kesenjangan ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan memengaruhi stabilitas politik dan sosial di tingkat lokal dan nasional. Kenaikan PPN membawa implikasi besar terhadap konsumsi rumah tangga dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Meskipun kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan negara, dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor UMKM harus diantisipasi dengan kebijakan mitigasi yang tepat. Kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan mendukung daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang lebih rentan, akan sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk dari kenaikan PPN dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan Mitigasi

Untuk mengatasi dampak negatif kenaikan PPN, diperlukan kebijakan mitigasi yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan tambahan dari kenaikan PPN benar-benar dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur di daerah, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Selain itu, pemberian insentif atau pengecualian pajak bagi barang kebutuhan pokok dapat membantu mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk meminimalkan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN dapat dijalankan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi. Untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini, diperlukan kebijakan mitigasi yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, mendukung konsumsi rumah tangga, dan melindungi sektor-sektor ekonomi yang rentan, seperti UMKM. Berikut adalah beberapa kebijakan mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak dari kenaikan PPN:

- 1) **Pemberian Subsidi pada Barang Pokok:** Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi dampak kenaikan PPN pada masyarakat, khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah, adalah dengan memberikan subsidi pada barang-barang pokok yang sering dikonsumsi. Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung pada barang-barang seperti bahan pangan, energi, dan obat-obatan yang merupakan kebutuhan dasar. Subsidi ini akan meringankan beban masyarakat yang terpengaruh oleh kenaikan harga akibat PPN. Selain itu, subsidi ini dapat difokuskan pada daerah-daerah yang paling rentan, seperti daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sehingga memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan yang tepat.
- 2) **Insentif untuk Sektor UMKM:** UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian daerah, namun juga sangat rentan terhadap dampak kenaikan PPN. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi dapat mencakup pemberian insentif fiskal bagi UMKM, seperti pengurangan pajak, pemberian potongan harga untuk biaya operasional, atau penyederhanaan proses administrasi perpajakan. Hal ini akan membantu UMKM tetap bertahan dan dapat menyerap beban biaya yang timbul akibat kenaikan PPN. Pemerintah juga bisa memberikan dukungan dalam bentuk akses modal yang lebih mudah dan terjangkau, agar UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan harga dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM juga dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk.

- 3) **Penguatan Infrastruktur dan Akses Distribusi Barang:** Kenaikan harga barang di daerah, terutama daerah terpencil, sering kali disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan logistik. Untuk mengurangi dampak ini, kebijakan mitigasi dapat difokuskan pada penguatan infrastruktur distribusi barang, seperti jalan raya, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Memperbaiki infrastruktur ini akan menurunkan biaya distribusi dan memastikan harga barang lebih stabil meskipun ada kenaikan PPN. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam memperbaiki jaringan distribusi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi utama. Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah transaksi dan distribusi barang di daerah juga dapat menjadi salah satu langkah mitigasi yang efektif.
- 4) **Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Kebijakan mitigasi lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan memperluas program perlindungan sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Program ini dapat menysasar kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak kenaikan PPN, seperti keluarga miskin, pekerja informal, dan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Selain bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan keterampilan atau pengembangan kewirausahaan juga penting. Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat, mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan yang dapat mengimbangi dampak kenaikan harga akibat PPN.
- 5) **Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Moneter yang Tepat:** Inflasi yang meningkat akibat kenaikan PPN dapat memperburuk dampak kebijakan fiskal ini terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi harus mencakup upaya pengendalian inflasi dengan cara yang lebih holistik. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, dapat menyesuaikan kebijakan suku bunga untuk menjaga inflasi tetap terkendali, serta meningkatkan likuiditas untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang terpengaruh. Selain itu, kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif, seperti pengurangan belanja negara yang tidak produktif, dapat membantu menstabilkan perekonomian dan mencegah inflasi yang lebih tinggi. Kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi yang masih berjalan.
- 6) **Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan:** Untuk memastikan kebijakan mitigasi berjalan dengan efektif, penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga riset, akademisi, dan masyarakat, dalam mengevaluasi dampak kebijakan PPN terhadap berbagai sektor ekonomi dan kelompok masyarakat.

Selain itu, analisis data yang akurat mengenai distribusi dampak kenaikan PPN dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan lebih lanjut yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga perlu melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, untuk mendapatkan masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan mitigasi yang tepat dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan PPN terhadap masyarakat daerah dan perekonomian nasional. Dengan pemberian subsidi untuk barang-barang pokok, insentif bagi UMKM, penguatan infrastruktur, serta program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah dapat membantu masyarakat dan sektor ekonomi yang paling rentan untuk bertahan dan berkembang. Kebijakan mitigasi ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, memperhatikan kondisi lokal, dan disertai dengan pemantauan serta evaluasi yang transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, kenaikan PPN dapat lebih diterima oleh masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kenaikan tarif PPN memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah dan perekonomian nasional. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini menimbulkan berbagai tantangan, seperti penurunan daya beli, tekanan pada konsumsi rumah tangga, dan kesenjangan ekonomi antardaerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan kebijakan ini mendukung pembangunan nasional tanpa menambah beban ekonomi masyarakat yang rentan. Dengan pengelolaan yang tepat, kenaikan PPN dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung kesejahteraan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kebijakan ini memberikan tantangan besar bagi masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang tepat, seperti pemberian subsidi yang lebih terarah, insentif bagi pelaku UMKM, dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Dengan pendekatan yang inklusif, kenaikan PPN dapat dikelola agar tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1).
- Kharisma, N. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 295-303.
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92-97.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Subur, H., & Syata, W. M. (2024). analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap masyarakat dan inflasi di indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(5), 205-210.
- Umami, N. N. (2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal PUSDANSI*, 2(8).